



Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah Kabupaten Konawe

Evaluation of the Performance of the National Unity and Political Agency in Maintaining Political Stability and Regional Security in Konawe Regency

Seskiya¹, Muhamad Irfan Rama², Yuliana Musin³

Universitas Lakidende Unaaha

Email: seskiya43@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 25-08-2026

Revised : 27-08-2026

Accepted : 29-08-2026

Published : 31-08-2026

Abstract

Political stability is a crucial prerequisite for sustainable regional development; therefore, the role of Kesbangpol as a local government agency responsible for fostering national insight, political education, and early detection of social conflicts is highly strategic. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants included the Head of the Agency, division heads, program staff, members of the Early Warning Forum (FKDM), and community leaders. The findings indicate that the implementation of political stability programs is carried out through community political education, facilitation of inter-group dialogue, supervision of community organizations, and strengthening early conflict detection mechanisms. Based on the indicators of effectiveness, efficiency, responsiveness, and accountability, the performance of Kesbangpol is categorized as good, although several challenges remain, such as budget limitations, geographical constraints, and the spread of unverified information through social media. Supporting factors include local government commitment, cross-sector collaboration, and active community participation. The study recommends strengthening community-based political education, optimizing the role of FKDM, utilizing information technology, and enhancing institutional capacity to improve sustainable organizational performance.

Keywords: Performance Evaluation, Political Stability, Regional Security

Abstrak

Stabilitas politik merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah, sehingga peran Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, dan deteksi dini konflik sosial menjadi sangat strategis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan terdiri atas Kepala Badan, kepala bidang, staf pelaksana, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program stabilitas politik dilakukan melalui pendidikan politik masyarakat, fasilitasi dialog antar kelompok, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta penguatan deteksi dini konflik sosial. Berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas, kinerja Kesbangpol tergolong baik, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah, serta pengaruh informasi tidak terverifikasi di media sosial. Faktor pendukung utama meliputi dukungan pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendidikan politik berbasis komunitas, optimalisasi peran FKDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi Kinerja, Stabilitas Politik, Keamanan Daerah



PENDAHULUAN

Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah Sebagai Fondasi Utama. Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat dasar bagi keberhasilan pembangunan di daerah. Tanpa kondisi politik yang kondusif, proses perumusan kebijakan publik, pelayanan administrasi pemerintah, serta pelaksanaan program pembangunan tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam perspektif teori pembangunan politik, Samuel P. Huntington mengatakan bahwa stabilitas politik merupakan indikator penting keberhasilan institusional sistem politik. Menurutnya, pembangunan politik tidak hanya ditandai oleh partisipasi masyarakat yang meningkat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga politik dalam mengelola konflik secara teratur. Stabilitas ini tidak hanya terkait dengan ketiadaan konflik, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah daerah menjaga harmoni sosial, memastikan kebijakan berjalan efektif, serta mencegah munculnya potensi ancaman yang dapat menghambat pembangunan ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan.

Dalam konteks pemerintah Indonesia, stabilitas politik di daerah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Desentralisasi mengandung implikasi bahwa pemerintah daerah bukan hanya pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga aktor utama dalam menjaga harmoni sosial politik di wilayahnya.

Secara teoritis, stabilitas politik berkaitan erat dengan kemampuan sistem politik dalam menjaga keseimbangan antara partisipasi dan institusional. *Gabriel A. Almond* menjelaskan bahwa stabilitas sistem politik bergantung pada fungsi struktural politik yang berjalan secara efektif. Apabila institusi politik mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sah, maka potensi konflik dapat diminimalisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki posisi strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam membina ideologi, pendidikan politik, dan deteksi dini konflik sosial. Peran ini sejalan dengan konsep manajemen konflik yang ditemukan oleh *Lewis A. Coser*, yang mengatakan bahwa konflik merupakan bagian inheren dari kehidupan sosial, tetapi dapat dikelola agar tidak berkembang menjadi destruktif. Dengan demikian, tugas Kesbangpol bukan menghilangkan konflik secara absolut, melainkan mengolahnya melalui pendekatan preventif dan dialogis.

Di era dinamika sosial yang semakin cepat, stabilitas politik juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti hubungan antar kelompok masyarakat, serta faktor eksternal seperti perkembangan politik nasional dan global. Karena itu, daerah dituntut memiliki kemampuan adaptif dalam mencermati perubahan dan menjaga keamanan melalui strategi pencegahan dan penanganan yang terukur.

Keberadaan organisasi masyarakat merupakan manifestasi partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial politik. Dalam teori partisipasi politik *Herbert* mengatakan bahwa partisipasi warga negara dalam organisasi sosial politik merupakan indikator demokratis yang sehat. Namun, partisipasi tersebut memerlukan regulasi dan pembinaan agar tetap berada dalam koridor hukum dan nilai kebangsaan. Pembinaan ormas oleh Kesbangpol dapat dipahami melalui pendekatan tata kelola pemerintah (*good Governance*). *Dwight Waldo* mengatakan bahwa aktivitas masyarakat selaras dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, pembinaan ormas bukan sekedar pengawasan administrasi, tetapi juga upaya membangun kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat.



Peran Strategis Badan Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di kabupaten konawe, beragam sosial memerlukan keberagaman sosial memerlukan pendekatan yang inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan teori integrasi sosial yang dikemukakan oleh *Talcott Parsons*, yang mengatakan bahwa stabilitas sosial tercapai apabila sistem sosial mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan melalui norma dan nilai bersama. Kesbangpol memegang fungsi sentral dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan melalui beberapa mandat utama, Deteksi Dini Deteksi dini adalah proses mengidentifikasi gejala, sinyal, atau dinamika yang berpotensi menimbulkan konflik atau gangguan ketertiban. Ini mencakup pengumpulan informasi, analisis situasi, serta pemetaan kerawanan sehingga pemerintah dapat mengambil langkah pencegahan sebelum masalah berkembang.

Pemetaan Potensi Konflik, Kesbangpol bertugas membuat peta potensi konflik seperti:

1. ketegangan antar suku atau kelompok masyarakat (konflik horizontal),
2. sengketa wilayah atau sumber daya,
3. dinamika politik lokal,
4. kerawanan sosial akibat ekonomi dan distribusi kesejahteraan.

Pemetaan ini penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai prioritas. Pembinaan Ideologi Kebangsaan, Melalui program pembinaan wawasan kebangsaan, Kesbangpol menguatkan nilai-nilai Pancasila, kerukunan, toleransi, cinta tanah air, serta komitmen menjaga persatuan. Upaya ini diperlukan agar masyarakat tetap resilien terhadap radikalisme, hoaks, dan polarisasi sosial-politik.

Meskipun memiliki peran strategis, Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe menghadapi beberapa tantangan yang berdampak pada tidak optimalnya pelayanan dan fungsi stabilisasi daerah, Potensi Konflik Horizontal Konawe memiliki karakteristik sosial yang beragam, termasuk penduduk lokal dan pendatang. Beberapa hal yang sering di memunculkan sebagai potensi gesekan, yang sering terjadi pada lingkungan sosial politik yang ada di Kabupaten konawe.

1. persaingan sumber daya,
2. perbedaan kepentingan politik,
3. perbedaan identitas sosial dan budaya,
4. isu-isu sensitif terkait pemilihan kepala daerah dan kebijakan pemerintah.

Distribusi Kewenangan yang Kurang Sinkron, Beberapa fungsi Kesbangpol bersinggungan dengan lembaga lain seperti Polri, TNI, Kecamatan, dan OPD teknis lainnya. Ketidakjelasan batas kewenangan atau tumpang tindih tugas dapat menghambat efektivitas program, misalnya dalam pemetaan konflik atau koordinasi keamanan.

Capaian Kinerja yang Belum Optimal, Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya kompetensi teknis, serta sistem pelaporan yang belum terintegrasi menyebabkan beberapa indikator kinerja belum tercapai maksimal. Program seperti pembinaan ideologi atau monitoring organisasi masyarakat kadang tidak berjalan konsisten. Koordinasi Lintas Lembaga yang Belum Terbangun Kuat, Isu stabilitas politik membutuhkan kolaborasi banyak pihak, namun koordinasi antar instansi sering menghadapi hambatan:



1. kurangnya komunikasi rutin,
2. tidak ada SOP bersama,
3. rendahnya budaya berbagi data dan informasi,
4. ego sektoral.

Dampaknya, respon terhadap potensi konflik menjadi lambat dan tidak terkoordinasi. Pentingnya Evaluasi Kinerja, Melihat permasalahan tersebut, evaluasi kinerja Kesbangpol menjadi kebutuhan yang mendesak. Evaluasi diperlukan untuk. Mengukur Efektivitas Program, Evaluasi menentukan apakah program deteksi dini, pemetaan konflik, dan pembinaan ideologi benar-benar memberikan dampak signifikan bagi stabilitas daerah. Tanpa evaluasi, program dapat berjalan tanpa arah dan tanpa perbaikan berkelanjutan.

Untuk mengetahui bahwa seluruh fungsi tersebut berjalan efektif, diperlukan evaluasi kinerja yang komprehensif. Menurut *William N. Dunn*, evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik untuk menilai efektivitas dan dampak suatu program. Evaluasi memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dalam perspektif administrasi publik Indonesia, *Agus Dwiyanto* mengatakan bahwa kinerja birokrasi publik harus diukur berdasarkan efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas.

Mengidentifikasi Kendala Lapangan, Masalah seperti kesulitan menjangkau wilayah tertentu, kurangnya data akurat, atau minimnya partisipasi masyarakat hanya dapat terungkap secara menyeluruh melalui evaluasi yang sistematis. Mengoptimalkan Sumber Daya, Sumber daya, baik SDM maupun sarana prasarana, perlu dipetakan agar digunakan secara efisien. Evaluasi membantu menentukan area mana yang membutuhkan peningkatan, seperti pelatihan SDM atau pembaruan teknologi. Menilai Kecukupan Dukungan Anggaran, Program pengendalian konflik dan pembinaan ideologi memerlukan anggaran yang memadai. Evaluasi membantu memastikan bahwa kebutuhan anggaran benar-benar sesuai dengan permasalahan dan target kinerja, sekaligus menjadi dasar perencanaan anggaran berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif evaluatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan secara mendalam kondisi aktual kinerja instansi, sekaligus menilai tingkat keberhasilan program dan fungsi organisasi berdasarkan indikator tertentu. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bersifat naturalistik, yaitu meneliti fenomena dalam kondisi apa adanya, bukan dalam situasi yang dimanipulasi oleh peneliti. Pendekatan ini sesuai digunakan ketika peneliti ingin memahami proses, perilaku, dan dinamika yang terjadi di dalam organisasi secara komprehensif.

1. Kualitatif Deskriptif

Metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena, aktivitas, dan kinerja instansi secara apa adanya berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Dalam konteks penelitian kinerja, pendekatan ini digunakan untuk:

- a. Menggambarkan bagaimana instansi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



- b. Menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan, mekanisme pelayanan, serta interaksi antara pegawai dan masyarakat.
- c. Mengungkap kondisi faktual organisasi, baik dari aspek sumber daya, proses kerja, maupun dinamika hubungan antar unit.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menguraikan realitas organisasi secara rinci tanpa memberikan perlakuan atau intervensi tertentu.

2. Kualitatif Evaluatif

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai efektivitas suatu kebijakan, program, atau kinerja organisasi. Menurut Dunn (2003), evaluasi adalah proses memberikan penilaian terhadap kinerja berdasarkan kriteria tertentu, seperti efektivitas, efisiensi, responsivitas, akuntabilitas, dan ketepatan.

Dalam penelitian ini, pendekatan evaluatif digunakan untuk:

- a. Menilai sejauh mana instansi telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Mengukur keberhasilan program berdasarkan indikator kinerja Mahmudi, Dwiyanto, dan Dunn.
- c. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menentukan apakah kinerja instansi sudah optimal atau masih memerlukan perbaikan.

Pendekatan evaluatif tidak hanya menggambarkan kondisi, tetapi juga memberikan penilaian sistematis terhadap capaian kinerja organisasi.

3. Alasan Penggunaan Pendekatan Kualitatif

Penggunaan metode kualitatif deskriptif–evaluatif didasarkan pada beberapa alasan, yaitu:

- a. Kinerja organisasi bersifat kompleks dan melibatkan dinamika sosial, proses internal, serta hubungan antar aktor, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau statistik.
- b. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam (in-depth understanding) tentang pelaksanaan tugas Kesbangpol, termasuk aspek yang tidak tercatat dalam dokumen.
- c. Evaluasi kinerja membutuhkan interpretasi terhadap proses, perilaku, dan makna, yang lebih tepat dianalisis secara kualitatif.
- d. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menangkap fenomena real-time yang berkembang di lapangan.

4. Hasil yang Diharapkan dari Metode Ini, Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan:

- a. Gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai kondisi aktual kinerja instansi.
- b. Penilaian objektif berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang relevan.



- c. Temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas instansi.
- d. Rekomendasi perbaikan kinerja yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi instansi terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Konawe. Teknik yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Penggunaan beberapa teknik ini bertujuan untuk saling melengkapi dan memperkuat data penelitian.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposif, yaitu pihak yang mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol Kabupaten Konawe. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman berdasarkan indikator evaluasi kinerja, yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, akuntabilitas, dan produktivitas. Informasi yang digali meliputi:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Mekanisme kerja dan koordinasi.
- c. Respons terhadap kondisi politik dan keamanan daerah.
- d. Pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja.
- e. Faktor pendukung dan penghambat kinerja.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas dan proses kerja di Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe. Melalui observasi, peneliti dapat mengetahui kondisi nyata pelaksanaan tugas instansi. Hal-hal yang diamati meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan.
- b. Pola kerja dan disiplin aparatur.
- c. Koordinasi antar pegawai dan pihak terkait.
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen dan arsip resmi yang berkaitan dengan kinerja Kesbangpol Kabupaten Konawe. Data dokumentasi berfungsi untuk mendukung hasil wawancara dan observasi.

Dokumen yang digunakan antara lain:

- a. Laporan kinerja dan laporan kegiatan.
- b. Rencana Strategis (Renstra).



- c. RPJMD Kabupaten Konawe.
- d. Program kerja dan dokumen kebijakan.
- e. Struktur organisasi dan uraian tugas.

4. Triangulasi

Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Triangulasi dilakukan melalui:

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi antar informan.
- b. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dengan teknik pengumpulan data tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, objektif, dan mendalam mengenai kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena memberikan langkah analisis yang sistematis dalam mengolah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahapan analisis terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang berkaitan dengan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Konawe berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas, akuntabilitas, dan produktivitas. Kegiatan reduksi data meliputi:

- a. Menyaring data sesuai tujuan penelitian.
- b. Mengelompokkan data berdasarkan tema dan indikator kinerja.
- c. Menghapus data yang tidak relevan atau berulang.
- d. Merangkum hasil wawancara dan catatan lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks sehingga memudahkan peneliti memahami hasil penelitian.

Penyajian data difokuskan pada:

- a. Hasil wawancara dan observasi berdasarkan indikator kinerja.
- b. Perbandingan data lapangan dengan dokumen resmi seperti laporan kinerja, Renstra, dan RPJMD.



c. Gambaran kondisi kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data untuk merumuskan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan diperoleh melalui proses verifikasi selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini peneliti:

- a. Menginterpretasikan temuan berdasarkan indikator kinerja.
- b. Menilai capaian dan kendala kinerja instansi.
- c. Mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu.
- d. Menyusun kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah

Untuk memahami konteks stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Konawe, perlu dikaji juga kondisi demografis wilayah yang menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika sosial. Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik* (BPS) dan publikasi terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Konawe pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 267.140 jiwa, dengan mayoritas penduduk berada pada kelompok usia produktif 15–59 tahun, yakni sekitar 65,09% dari total populasi. Kelompok anak usia 0–14 tahun mencapai sekitar 25,84%, **sedangkan penduduk usia lanjut (≥ 60 tahun) sekitar 9,07%**. Kondisi demografis ini mencerminkan struktur usia dominan produktif yang dapat berpengaruh terhadap dinamika sosial dan politik di daerah.

Wilayah ini memiliki luas wilayah administratif sekitar 5.352,38 km², menunjukkan karakteristik wilayah yang relatif luas dan beragam, sehingga memerlukan pendekatan kelembagaan yang efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Kondisi stabilitas politik di Kabupaten Konawe secara umum masih dinilai kondusif, meskipun terdapat tantangan seperti dinamika politik jelang pemilihan umum dan potensi konflik sosial akibat isu lahan serta pluralitas sosial yang perlu diantisipasi melalui pendekatan preventif, koordinatif, dan edukatif. Peran Badan Kesbangpol dalam hal ini terletak pada kemampuan kelembagaan untuk melakukan deteksi dini, koordinasi lintas sektor, dan pembinaan masyarakat yang efektif bekerjasama dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian ini akan dilaksanakan selama enam bulan terhitung sejak judul penelitian disetujui oleh pihak yang berwenang hingga bulan Mei. Tahapan penelitian meliputi: (1) dua bulan pertama digunakan untuk kegiatan observasi awal, penyusunan proposal penelitian, serta pelaksanaan seminar proposal; (2) tiga bulan berikutnya digunakan untuk pelaksanaan penelitian yang mencakup pengumpulan data, wawancara, dan observasi di lingkungan kerja; (3) satu bulan terakhir digunakan untuk pengolahan dan analisis data, penyusunan hasil penelitian, konsultasi skripsi, revisi, serta penyelesaian skripsi hingga tahap akhir pada bulan Mei.

Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator

Kinerja Badan Kesbangpol dalam program stabilitas politik dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci:



1. Efektivitas Program Efektivitas diukur dari pencapaian tujuan program, antara lain peningkatan kesadaran politik masyarakat, penurunan potensi konflik, serta keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi. Berdasarkan data monitoring, sekitar 70% peserta lokakarya dan penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai partisipasi politik dan nilai-nilai kebangsaan.
2. Efisiensi Pelaksanaan Efisiensi menilai sejauh mana sumber daya (SDM, anggaran, sarana-prasarana) dimanfaatkan secara optimal. Hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar program menggunakan anggaran sesuai perencanaan, meskipun beberapa kegiatan di daerah terpencil memerlukan biaya transportasi tambahan.
3. Responsivitas terhadap Dinamika Sosial Kesbangpol terbukti responsif dalam menanggapi isu sosial-politik. FKDM mampu mendeteksi potensi konflik dan mengkoordinasikan intervensi awal, sehingga insiden politik berskala kecil dapat dicegah sebelum meluas.
4. Akuntabilitas
Setiap kegiatan dilengkapi laporan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan masyarakat. Sistem ini memperkuat transparansi kinerja Badan Kesbangpol. Berdasarkan indikator di atas, kinerja Kesbangpol dapat dikategorikan baik, meskipun terdapat ruang perbaikan terkait capaian partisipasi masyarakat di wilayah terpencil dan efektivitas penyebaran informasi digital.

Efektivitas Kinerja Badan Kesbangpol

Efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas kinerja Badan Kesbangpol dilihat dari keberhasilan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol, diketahui bahwa berbagai program telah dilaksanakan untuk menjaga stabilitas politik di Kabupaten Konawe, seperti kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta koordinasi dengan aparat keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara Kesbangpol kabupaten konawe :

“Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe, diketahui bahwa Badan Kesbangpol memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik daerah melalui kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat serta pembinaan organisasi kemasyarakatan agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Badan Kesbangpol menyatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara rutin sebagai upaya meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan menjaga kondisi daerah tetap aman dan kondusif.”

Penggunaan Sumber Daya dalam Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Dalam konteks *Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah Kabupaten Konawe*, penggunaan sumber daya menjadi aspek penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Sumber daya yang dimaksud meliputi:



1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kesbangpol harus memiliki kompetensi dalam deteksi dini konflik, komunikasi politik, serta pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Efektivitas kinerja sangat dipengaruhi oleh jumlah, kualitas, dan profesionalitas pegawai.
2. Sumber Daya Keuangan (Anggaran) Pengelolaan anggaran digunakan untuk mendukung program seperti sosialisasi wawasan kebangsaan, forum komunikasi masyarakat, serta kegiatan deteksi dan pencegahan konflik. Evaluasi dilihat dari efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran terhadap output kegiatan.
3. Sarana dan Prasarana Meliputi fasilitas kantor, teknologi informasi, serta alat pendukung koordinasi dan monitoring kondisi daerah. Ketersediaan sarana yang memadai akan meningkatkan responsivitas terhadap potensi gangguan keamanan.
4. Sumber Daya Jaringan dan Koordinasi Kesbangpol bekerja sama dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Kekuatan jaringan ini menjadi sumber daya strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Responsivitas Badan Kesbangpol

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi dalam merespon kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Badan Kesbangpol, diketahui bahwa organisasi ini berupaya merespon setiap permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan daerah.

Responsivitas Badan Kesbangpol merupakan kemampuan instansi dalam mengenali, merespons, dan menangani secara cepat berbagai dinamika politik serta potensi gangguan keamanan di daerah. Responsivitas ini terlihat dari kecepatan tindakan, ketepatan kebijakan, serta kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang berkembang di masyarakat.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan. Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe secara rutin menyusun laporan kegiatan serta laporan kinerja yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dilakukan. Dengan adanya laporan kinerja tersebut, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana keberhasilan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugasnya.

Evaluasi Capaian Program

Evaluasi capaian program merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program yang direncanakan dapat terealisasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Evaluasi capaian program menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol berhasil:

1. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan dan lokakarya;
2. Menurunkan potensi konflik lokal melalui fasilitasi FKDM dan dialog antar kelompok;



3. Memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sumber daya SDM sesuai perencanaan tahunan. Namun, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa kekurangan, misalnya tingkat partisipasi masyarakat di desa terpencil masih rendah, penyebaran informasi politik di kalangan pemilih pemula tidak merata, dan beberapa kegiatan monitoring belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dari informan yang menjadi sumber dalam penelitian ini.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Keterlibatan aktif masyarakat membantu pemerintah dalam mendeteksi dini potensi konflik serta menciptakan situasi yang kondusif.

1. Faktor Pendukung

- a. Dukungan Pemerintah Daerah Bupati dan Sekretariat Daerah memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai untuk pelaksanaan program.
- b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Terlatih Staf Kesbangpol memiliki kompetensi dalam pendidikan politik, fasilitasi dialog, dan deteksi konflik.
- c. Kolaborasi Lintas Sektor Koordinasi dengan FKDM, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan meningkatkan efektivitas intervensi dan respon cepat terhadap isu sosial-politik.
- d. Partisipasi Aktif Masyarakat Kehadiran pemuda, pelajar, dan tokoh masyarakat dalam berbagai kegiatan menunjukkan partisipasi yang semakin meningkat.

2. Faktor Penghambat

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Anggaran yang terbatas dapat membatasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan konflik, sosialisasi wawasan kebangsaan, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.

- a. Kendala Geografis dan Transportasi Wilayah yang luas dan terpencil menyulitkan pelaksanaan kegiatan secara merata.
- b. Tingkat Kesadaran Politik yang Beragam Sebagian masyarakat kurang memahami peran dan mekanisme politik, sehingga partisipasi tidak merata.
- c. Pengaruh Media Sosial Negatif Penyebaran informasi tidak terverifikasi dapat memicu konflik atau menimbulkan kebingungan di masyarakat.
- d. Keterbatasan Anggaran di Wilayah Terpencil Beberapa kegiatan membutuhkan dana tambahan untuk transportasi dan logistik, yang kadang tidak tersedia dalam perencanaan awal.



Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja Badan Kesbangpol dalam program stabilitas politik:

1. Penguatan Pendidikan Politik Berbasis Komunitas Menyasar pemuda, pemilih pemula, dan warga desa terpencil melalui pelatihan, workshop, dan forum komunitas yang melibatkan tokoh lokal untuk meningkatkan kesadaran politik.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Digital Mengembangkan aplikasi atau platform media sosial resmi untuk menyebarkan informasi politik dan advokasi kewaspadaan konflik secara cepat dan luas.
3. Optimalisasi FKDM dan Jaringan Mitra Strategis Memperluas cakupan FKDM hingga desa-desa terpencil, serta membangun kemitraan dengan tokoh agama, LSM, dan organisasi kepemudaan untuk deteksi dini konflik.
4. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data Meningkatkan sistem evaluasi dengan indikator kuantitatif dan kualitatif yang lebih rinci, termasuk survei persepsi masyarakat dan analisis dampak kegiatan program.
5. Peningkatan Dukungan Anggaran dan Logistik Menyediakan anggaran tambahan untuk kegiatan di wilayah sulit dijangkau agar program dapat berjalan merata dan efektif.
6. Pendekatan Kultural dan Partisipatif Memadukan pendekatan budaya lokal dengan strategi pendidikan politik agar pesan stabilitas politik dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan Badan Kesbangpol dapat meningkatkan efektivitas program stabilitas politik, memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara positif, serta menjaga ketertiban dan keamanan daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif terhadap pelaksanaan program stabilitas politik oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian:

1. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah telah berjalan cukup baik melalui pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan politik masyarakat, serta deteksi dini terhadap potensi konflik sosial. Hal ini terlihat dari adanya kerja sama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif, khususnya pada pelaksanaan kegiatan politik dan sosial kemasyarakatan.
2. Meskipun demikian, pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan edukasi politik kepada masyarakat agar stabilitas politik dan keamanan di Kabupaten Konawe dapat terus terjaga secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe. *Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huntington, S. P. (2006). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2011). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang *Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik*.
- Robbins, S. P. (2009). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Sedarmayanti. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suokanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Penanganan Konflik Sosial*.